



Dekonstruksi Kuliner sebagai Alat Diplomasi Budaya Lokal: Studi Kasus Ekologi Politik Lawa Bale di Komunitas Danau Tempe

Achmad Hidayah Muslim¹⁾, Gustiana A. Kambo²⁾, Muhammad Saad³⁾

Program Studi Magister Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Corresponding author: ahyatmuslim@gmail.com

Abstrak

Dalam era globalisasi yang semakin mengaburkan batas budaya, kuliner tradisional tidak hanya berfungsi sebagai representasi identitas lokal, tetapi juga menjadi ruang kontestasi sosial, politik, dan ekologis. Penelitian ini mengkaji degradasi makna kuliner tradisional Lawa Bale di komunitas Danau Tempe sebagai simbol budaya yang tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh relasi kuasa, kebijakan pembangunan, dan kepentingan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan dekonstruksi Jacques Derrida dalam perspektif ekologi politik, penelitian ini menganalisis bagaimana Lawa Bale yang sebelumnya dimaknai sebagai bagian dari hubungan harmonis antara manusia, alam, dan leluhur mengalami transformasi menjadi instrumen diplomasi budaya dan representasi pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi Lawa Bale dalam kebijakan budaya dan pariwisata tidak hanya menghasilkan penguatan identitas lokal, tetapi juga memperlihatkan kontradiksi antara narasi pelestarian budaya dengan realitas degradasi ekologis Danau Tempe. Melalui analisis oposisi biner antara alam dan budaya, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, serta lokal dan global, penelitian ini menemukan bahwa Lawa Bale telah mengalami pergeseran dari praktik budaya yang hidup menjadi simbol pembangunan yang berpotensi melegitimasi kebijakan berbasis cultural greenwashing. Dalam konteks tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menunjukkan bahwa kuliner lokal dapat dipahami sebagai teks politik yang mampu mengungkap bagaimana simbol budaya digunakan untuk membangun legitimasi keberlanjutan, sementara persoalan ekologis dan kepentingan masyarakat lokal belum sepenuhnya terselesaikan. Dengan demikian, kuliner tradisional tidak hanya dapat dipahami sebagai warisan budaya atau instrumen diplomasi, tetapi juga sebagai arena politik yang memperlihatkan hubungan antara representasi budaya, kekuasaan, dan krisis ekologis dalam praktik pembangunan daerah.

Kata kunci: Degradasi Budaya; Diplomasi Budaya; Ekologi Politik; Greenwashing; Komunitas Danau Tempe; Lawa Bale

Abstract

In an era of globalization that increasingly blurs cultural boundaries, traditional cuisine serves not only as a representation of local identity but also as a space of social, political, and ecological contestation. This study examines the degradation of meaning surrounding Lawa Bale in the Lake Tempe community as a cultural symbol shaped by power relations, development policies, and economic interests. Employing Jacques Derrida's deconstruction approach within a political ecology perspective, this study analyzes how Lawa Bale, which was historically understood as a cultural practice reflecting harmonious relations between humans, nature, and ancestors, has been transformed into an instrument of local cultural diplomacy and regional development representation. The findings reveal that the representation of Lawa Bale within cultural and tourism policies does not merely strengthen local identity but also exposes contradictions between cultural preservation narratives and the ecological degradation of Lake Tempe. Through an



analysis of binary oppositions, including nature versus culture, economic growth versus environmental sustainability, and local versus global, this study demonstrates that Lawa Bale has shifted from a living cultural practice into a symbolic instrument of development discourse that potentially legitimizes cultural greenwashing. This study contributes conceptually by demonstrating that local cuisine can be understood as a political text through which cultural symbols are mobilized to construct narratives of sustainability, while underlying ecological problems and the interests of local communities remain insufficiently addressed. Therefore, traditional cuisine should not be viewed merely as cultural heritage or an instrument of diplomacy, but also as a political arena that reveals the relationship between cultural representation, power relations, and ecological crises within local development practices.

Keywords: *Cultural Degradation; Cultural Diplomacy; Cultural Greenwashing; Lake Tempe Community; Lawa Bale; Political Ecology.*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang semakin mengaburkan batas antarbudaya, identitas lokal mengalami tantangan serius dalam mempertahankan eksistensinya. Transformasi sosial yang cepat, arus informasi global, serta dominasi budaya populer menyebabkan budaya-budaya lokal kehilangan ruang representasinya. Arus globalisasi yang mendominasi mengaburkan medium budaya lokal sebagai alat politik untuk menyatukan perbedaan budaya melalui nilai-nilai yang direpresentasikan melalui interaksi sosial dan politik masyarakat. Dalam kajian antropologi budaya, tradisi dan identitas lokal dipahami sebagai realitas yang terus berubah mengikuti dinamika sosial, sementara kajian komodifikasi budaya menunjukkan bahwa representasi lokal kerap diarahkan untuk kepentingan ekonomi dan politik (Wahyuni, 2021; Windia, 2020). Di sisi lain, eksistensi politik identitas dapat menjadi alat yang represif dan memecah masyarakat antarkelompok budaya, terlebih ketika didorong oleh framing media pada era globalisasi. Dalam konteks Bugis, tradisi, kuasa, konflik, dan budaya politik tidak dapat dipisahkan dari cara masyarakat membangun identitas kolektif dan praktik demokrasi lokal (Ridwan, 2017; Saleh & Munif, 2015). Oleh karena itu, dibutuhkan strategi budaya yang mampu memperkuat identitas komunitas, salah satunya melalui kuliner tradisional sebagai medium diplomasi budaya. Diperlukan peletakan kembali substansi budaya lokal sebagai medium politik yang sarat nilai adat dan sejalan dengan tujuan kolektif masyarakat dalam kehidupan sosial politik. Kuliner tradisional dalam hal ini tidak hanya berbicara tentang cita rasa indrawi, tetapi juga cita rasa nonmaterial yang berfungsi sebagai wadah diplomasi antarkomunitas.

Indonesia sebagai negara multikultural memiliki kekayaan kuliner tradisional yang sangat besar, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam kerangka diplomasi budaya. Sejumlah kuliner telah mulai diangkat dalam narasi nasional, seperti rendang, tempe, atau betutu. Kajian tentang makanan tradisional menunjukkan bahwa kuliner dapat digunakan sebagai sarana diplomasi budaya sekaligus representasi identitas lokal di tengah arus globalisasi (Mahendra, 2023; Pratiwi & Wicaksono, 2022). Di berbagai daerah di Indonesia, kuliner yang sarat akan nilai yang substansial belum banyak diperkenalkan terlebih dalam lokus pengkajian sosial-politik. Padahal, kuliner sebagai bagian dari local wisdom merupakan salah satu hal yang potensial dalam membangun identitas, gerakan wacana serta penyatuan tujuan kolektif dalam masyarakat (Effendi, 2018). Namun, ketika kuliner lokal masuk ke arena festival, wisata, dan promosi daerah, ia juga berisiko mengalami komodifikasi, yaitu perubahan dari praktik budaya yang hidup menjadi produk yang disesuaikan dengan selera pasar (Pratiwo, 2019; Putri & Susilowati, 2022; Wahyuni, 2021).

Meskipun kajian mengenai diplomasi kuliner telah berkembang, sebagian besar penelitian masih berfokus pada bagaimana makanan tradisional digunakan sebagai instrumen promosi identitas dan hubungan budaya antarwilayah maupun antarnegara. Kajian tersebut cenderung melihat kuliner sebagai representasi budaya yang memperkuat citra suatu komunitas atau negara, sementara aspek politik, relasi kuasa, dan persoalan ekologis yang melekat pada praktik kuliner lokal masih kurang mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang melihat kuliner tidak hanya sebagai produk budaya, tetapi sebagai ruang sosial-politik tempat

berlangsungnya negosiasi makna, kepentingan pembangunan, dan keberlanjutan ekologis. Dalam konteks tersebut, penelitian mengenai Lawa Bale di komunitas Danau Tempe menawarkan perspektif berbeda karena kuliner ini tidak hanya menjadi simbol identitas masyarakat Bugis, tetapi juga memiliki keterikatan langsung dengan kondisi ekologis danau sebagai ruang hidup masyarakat lokal.

Salah satu kuliner lokal yang memiliki potensi simbolik dan diplomatik tetapi belum memperoleh perhatian akademik dan kebijakan yang memadai adalah Lawa Bale, makanan khas komunitas Danau Tempe di Sulawesi Selatan. Lawa Bale adalah salah satu kuliner khas masyarakat di sekitar Danau Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kata "lawa" dalam bahasa Bugis umumnya merujuk pada makanan yang dibuat dari bahan-bahan segar, sering kali tanpa dimasak terlebih dahulu, dan diberi campuran kelapa parut, jeruk nipis, serta rempah lokal. Sedangkan "bale" berarti ikan. Maka, Lawa Bale secara harfiah dapat diartikan sebagai "ikan mentah berbumbu". Lawa Bale bukan sekadar sajian kuliner, melainkan bagian dari ritual adat, pertemuan sosial, dan wacana budaya masyarakat Danau Tempe yang menyimbolkan kesucian, penghormatan terhadap leluhur, serta kearifan lokal. Keberadaannya mencerminkan cara komunitas lokal memaknai dirinya di tengah perubahan sosial yang dinamis.

Kuliner tidak lagi hanya dipahami sebagai kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai simbol budaya yang membawa narasi sejarah, nilai-nilai, dan identitas kolektif. Kajian sosial-budaya menempatkan makanan tradisional sebagai medium komunikasi simbolik yang menegosiasikan nilai, makna, dan kuasa dalam relasi sosial serta antarbudaya (Effendi, 2018; Mahendra, 2023; Pratiwi & Wicaksono, 2022). Pemaknaan budaya lokal, salah satunya kuliner, dalam konteks sosial-politik mengalami pergeseran makna. Perubahan tersebut tidaklah netral karena terjadi dalam ruang sosial yang dipenuhi oleh kekuasaan simbolik, politik representasi, dan logika pembangunan. Pemerintah daerah, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Danau Tempe, menetapkan bahwa Danau Tempe dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata seperti festival danau, rumah terapung, dan industri wisata (Pasal 9). Meski perda menyatakan bahwa kegiatan wisata tidak boleh bertentangan dengan budaya lokal, dalam praktiknya representasi budaya seperti Lawa Bale justru berpotensi mengalami penyederhanaan makna agar sesuai dengan kebutuhan estetika dan pasar wisata. Fenomena ini sejalan dengan kajian kebijakan budaya dan politik representasi yang menunjukkan bahwa negara dapat membentuk identitas regional melalui instrumen kebijakan, sekaligus membuka ruang kontestasi antara masyarakat lokal, aktor politik, dan mekanisme pasar (Kurniawan & Handayani, 2022; Rahayu & Palupi, 2023; Setiawan, 2022). Degradasi makna ini memiliki implikasi epistemologis dan politis yang berkelanjutan, karena produksi makna budaya tidak lagi sepenuhnya bersifat historis dan filosofis, tetapi disesuaikan dengan kepentingan modernisasi positivistik oleh birokrasi dan kapital. Negara sebagai aktor dominan turut mengatur tidak hanya tata ruang danau, tetapi juga konstruksi makna budaya yang melekat pada simbol-simbol lokal seperti Lawa Bale. Dalam kerangka komodifikasi, budaya dapat dijadikan komoditas dalam sirkulasi kapital yang dibungkus dengan narasi pelestarian dan modernisasi (Pratiwo, 2019; Putri & Susilowati, 2022; Wahyuni, 2021). Pada gilirannya, wacana tersebut dapat menutupi permasalahan ekologis seperti penurunan kualitas air, pendangkalan Danau Tempe, serta marginalisasi komunitas nelayan tradisional yang bergantung pada ekosistem danau.

Dalam kerangka analitis, penelitian ini menggunakan pendekatan dekonstruksi Jacques Derrida, yang menegaskan bahwa makna dalam teks budaya bersifat tidak final dan selalu bergantung pada jaringan tanda lain dalam konteks sosial-politik yang lebih luas. Derrida berpendapat bahwa "tidak ada luar teks" (*il n'y a pas de hors-texte*) (Derrida, 1976), yang mengindikasikan bahwa teks budaya harus dibaca sebagai medan relasi kuasa dan konflik makna. Dengan pendekatan ini, Lawa Bale dianalisis sebagai teks sosial yang merefleksikan kontradiksi dan oposisi biner yang melekat dalam wacana pembangunan berkelanjutan, seperti alam versus budaya, pertumbuhan ekonomi versus kelestarian lingkungan, serta lokal versus global. Oposisi-oposisi tersebut penting dibaca melalui perspektif ekologi politik karena pengelolaan lingkungan selalu berkaitan dengan relasi kuasa, akses atas sumber daya, dan

kepentingan negara maupun kapital (Kuntjorobekti & Priyono, 2019; Robbins, 2012). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis degradasi makna Lawa Bale dari sebuah praktik ritual sakral-ekologis menjadi alat diplomasi budaya yang mengalami proses komodifikasi dalam kebijakan pembangunan daerah. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana kuliner tradisional digunakan sebagai medium representasi politik dan ekologi politik yang kompleks, di mana simbol-simbol budaya diproduksi, didekonstruksi, dan direpresentasikan dalam narasi pelestarian yang tidak selalu sejalan dengan kondisi ekologis Danau Tempe. Oleh karena itu, Lawa Bale tidak dapat dilihat sebagai entitas budaya statis, melainkan sebagai teks politik yang memperlihatkan relasi antara budaya, kekuasaan, dan keberlanjutan lingkungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma dekonstruksi Jacques Derrida untuk menganalisis perubahan makna Lawa Bale dalam relasinya dengan budaya, kebijakan, dan kondisi ekologis masyarakat Danau Tempe. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran variabel, melainkan memahami konstruksi makna, praktik sosial, serta relasi kuasa yang membentuk representasi budaya lokal. Penelitian dilakukan di kawasan Danau Tempe yang mencakup wilayah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sebagai ruang sosial masyarakat yang mempertahankan tradisi Lawa Bale sekaligus mengalami perubahan ekologis dan intervensi kebijakan pembangunan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi selama periode penelitian tahun 2025–2026. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap tradisi Lawa Bale serta pengelolaan Danau Tempe. Informan penelitian terdiri atas masyarakat lokal yang masih mempraktikkan tradisi Lawa Bale, tokoh adat, nelayan Danau Tempe, serta aktor pemerintahan daerah yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan budaya dan kawasan Danau Tempe. Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh perspektif yang beragam mengenai hubungan antara budaya lokal, kebijakan daerah, dan perubahan ekologis.

Data sekunder diperoleh melalui dokumen kebijakan dan sumber tertulis yang relevan, meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Danau Tempe, dokumen pemerintah daerah terkait pengembangan pariwisata dan kebudayaan, laporan kondisi ekologis Danau Tempe, serta literatur akademik yang membahas ekologi politik, komodifikasi budaya, dan diplomasi kuliner.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, penelitian mengidentifikasi konstruksi makna Lawa Bale dalam berbagai teks sosial, seperti narasi masyarakat lokal, dokumen kebijakan pemerintah, dan representasi budaya dalam program pembangunan daerah. Kedua, penelitian melakukan pembacaan dekonstruktif dengan melihat adanya ketegangan, kontradiksi, dan makna yang tersembunyi dalam narasi tersebut. Dalam tahap ini, Lawa Bale tidak dipahami sebagai simbol budaya yang memiliki makna tunggal, tetapi sebagai teks sosial yang terus mengalami perubahan makna melalui relasi kuasa antara masyarakat, negara, dan kepentingan ekonomi.

Ketiga, penelitian menguraikan oposisi biner yang muncul dalam konstruksi wacana mengenai Lawa Bale dan Danau Tempe, seperti alam versus budaya, pertumbuhan ekonomi versus kelestarian lingkungan, serta lokal versus global. Oposisi tersebut dianalisis untuk melihat bagaimana suatu makna diposisikan lebih dominan dibandingkan makna lainnya dalam praktik kebijakan dan pembangunan. Melalui proses dekonstruksi ini, penelitian berupaya mengungkap bagaimana narasi pelestarian budaya dapat mengalami pergeseran menjadi instrumen legitimasi pembangunan apabila tidak disertai dengan perlindungan terhadap kondisi ekologis dan keberlanjutan masyarakat lokal.

Dengan demikian, metode dekonstruksi dalam penelitian ini digunakan bukan sekadar untuk mengkritik teks, tetapi sebagai strategi analisis untuk membongkar hubungan antara representasi budaya, kebijakan publik, dan krisis ekologis yang membentuk keberadaan Lawa Bale di komunitas Danau Tempe.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lawa Bale dalam Tradisi dan Kebijakan Lokal

Lawa Bale adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari komunitas di sekitar Danau Tempe, tepatnya di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Makanan ini tidak hanya dikenal sebagai hidangan kuliner lokal, tetapi juga memiliki makna budaya dan filosofis yang mendalam bagi masyarakat lokal, terutama suku Bugis yang mendiami wilayah tersebut. Secara harfiah, kata "lawa" dalam bahasa Bugis merujuk pada jenis makanan yang dibuat dengan cara sederhana, sering kali tanpa dimasak secara matang, dan menggunakan bahan-bahan segar. Sementara itu, "bale" berarti ikan. Dengan demikian, Lawa Bale dapat diartikan sebagai "ikan mentah yang diolah dengan bumbu alami". Proses pengolahannya biasanya melibatkan campuran kelapa parut segar, air jeruk nipis, serta aneka rempah-rempah lokal yang memberikan cita rasa khas segar, asam, gurih, dan sedikit pedas. Namun, Lawa Bale bukan sekadar makanan biasa. Di balik rasanya yang unik, hidangan ini memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Danau Tempe. Ia sering disajikan dalam acara-acara adat, ritual keagamaan tradisional, pertemuan keluarga besar, atau saat upacara penyambutan tamu penting. Dalam konteks ini, Lawa Bale menjadi simbol penghormatan terhadap leluhur, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Kearifan lokal bekerja melalui praktik semacam ini karena budaya hidup tidak hanya tersimpan dalam teks adat, tetapi juga dalam praktik keseharian, makanan, dan relasi sosial masyarakat (Effendi, 2018; Ridwan, 2017; Windia, 2020). Selain itu, keberadaan Lawa Bale mencerminkan hubungan masyarakat dengan sumber daya alam Danau Tempe, terutama ikan air tawar, yang menjadi dasar material bagi identitas kuliner tersebut. Kajian tentang kuliner tradisional Indonesia juga menunjukkan bahwa makanan lokal dapat menjadi jembatan antara memori budaya, identitas, dan diplomasi pada era globalisasi (Mahendra, 2023).

Dalam perkembangannya, meskipun modernisasi dan perubahan gaya hidup telah membawa banyak pengaruh baru, Lawa Bale tetap dipertahankan sebagai identitas kuliner dan budaya yang unik. Ia menjadi bagian dari cara masyarakat lokal memaknai jati diri mereka di tengah arus perubahan sosial yang semakin dinamis. Dalam praktiknya, Lawa Bale menghadapi kontradiksi antara makna budaya yang sakral dan realitas kebijakan pemerintah yang cenderung lebih fokus pada aspek ekonomi dan lingkungan fisik semata. Salah satu regulasi penting yang berkaitan langsung dengan keberadaan Lawa Bale adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No.14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Danau Tempe. Meskipun secara eksplisit tujuan perda ini adalah untuk melestarikan danau serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam implementasinya sering kali terjadi gesekan antara kebijakan formal dan praktik tradisional masyarakat lokal. Dalam kajian kebijakan budaya, konstruksi identitas regional melalui program pemerintah dapat memperkuat pengakuan budaya, tetapi juga dapat membakukan representasi lokal sesuai kebutuhan birokrasi (Setiawan, 2022). Di sisi lain, pengelolaan sumber daya air di Indonesia memperlihatkan bahwa kebijakan teknokratis sering berhadapan dengan pengetahuan lokal dan kepentingan masyarakat yang hidup dari ekosistem air.

Studi ekosistem Danau Tempe menunjukkan bahwa keberlanjutan budaya masyarakat sekitar danau sangat terkait dengan kondisi ekologis danau sebagai ruang hidup, sumber penghidupan, dan basis identitas komunitas. Dalam beberapa dekade terakhir, kondisi Danau Tempe semakin memprihatinkan karena pendangkalan, sedimentasi, pencemaran limbah, serta tekanan pemanfaatan sumber daya ikan. Laporan Balai Besar Wilayah Sungai Sulawesi II mencatat bahwa sedimentasi menjadi salah satu persoalan utama yang mengurangi daya dukung danau (BBWS, 2021). Temuan ini juga sejalan dengan laporan media lingkungan dan kajian ekologi politik yang menyoroti keterancaman Danau Tempe serta dampaknya terhadap nelayan Bugis dan masyarakat lokal (Mongabay Indonesia, 2021; Syamsuddin & Wahyuni, 2023). Akibatnya, bahan baku utama Lawa Bale, yakni ikan air tawar segar, semakin sulit diperoleh oleh masyarakat lokal. Dalam Pasal 3 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Danau Tempe disebutkan bahwa pengelolaan Danau Tempe bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat sekitar danau. Selain itu,

Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa pengelolaan Danau Tempe dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat sekitar danau, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Meskipun demikian, dalam praktiknya, implementasi perda ini sering kali lebih fokus pada aspek teknis dan kontrol birokratis daripada pelestarian budaya atau partisipasi aktif masyarakat. Hal ini tercermin dari pembatasan aktivitas penangkapan ikan yang tidak selalu didampingi strategi nyata untuk memulihkan stok ikan di danau.

Mayoritas keluarga di sekitar Danau Tempe memiliki kebiasaan menyajikan Lawa Bale saat upacara adat atau penyambutan tamu besar. Namun, karena semakin sulitnya mendapatkan ikan segar akibat penurunan kualitas air danau, praktik pembuatan Lawa Bale mulai langka. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi formal hadir dengan klaim perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, realitas ekologis yang rusak membuat tradisi tersebut sulit dipertahankan (BBWS, 2021; Mongabay Indonesia, 2021). Artinya, tanpa pemulihan ekosistem yang konkret, upaya pelestarian budaya seperti Lawa Bale tidak dapat terimplementasikan.

Kondisi tersebut juga diperkuat oleh pengalaman masyarakat lokal yang melihat perubahan ekologis Danau Tempe sebagai ancaman terhadap keberlangsungan tradisi. Salah seorang masyarakat nelayan menyatakan:

“Dulu ikan di danau mudah didapat, kalau ada acara keluarga atau tamu datang, Lawa Bale selalu dibuat. Sekarang ikan semakin sulit dicari karena kondisi danau sudah berbeda. Kalau tidak ada ikan, bagaimana tradisi itu bisa terus berjalan.” (Wawancara masyarakat nelayan Danau Tempe, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan Lawa Bale tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekologis Danau Tempe sebagai ruang hidup masyarakat. Dengan demikian, degradasi lingkungan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi masyarakat nelayan, tetapi juga memengaruhi reproduksi budaya yang selama ini melekat pada komunitas lokal.

Dekonstruksi Makna Budaya Lokal: Antara Pelestarian dan Eksploitasi

Budaya lokal dalam dinamikanya tidak dapat dipandang sebagai entitas yang statis, murni, atau bebas dari pengaruh eksternal. Dalam konteks modernitas dan globalisasi, budaya lokal selalu berada dalam kondisi dinamis, menjadi medan pertemuan antara tradisi, kebijakan pemerintah, serta mekanisme pasar (Wahyuni, 2021; Windia, 2020).

Fenomena ini mencerminkan kompleksitas makna budaya yang bersilangan dengan aspek-aspek internal seperti kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam masyarakat. Salah satu aspek yang dekat antara persilangan kebijakan dan budaya lokal adalah wacana pelestarian budaya. Dalam wacana pembangunan daerah, istilah “pelestarian budaya” digunakan sebagai legitimasi kebijakan oleh negara dengan tujuan formil untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Namun, jika dicermati lebih mendalam, narasi pelestarian tersebut bisa menyembunyikan bentuk-bentuk dominasi baru atas ruang budaya lokal. Kajian kebijakan budaya pasca-Orde Baru menunjukkan bahwa identitas daerah kerap dikonstruksi melalui kebijakan yang tampak melestarikan, tetapi sekaligus mengatur cara budaya lokal direpresentasikan (Setiawan, 2022). Proses ini menunjukkan bahwa makna budaya tidak stabil, tetapi selalu bersifat tertunda (*différance*), hierarkis, dan dibangun dalam relasi kuasa. Sebagai pendekatan terhadap stabilitas makna, dekonstruksi Jacques Derrida, memberikan kerangka analitis yang relevan untuk menganalisis kontradiksi internal dalam struktur wacana budaya. Melalui lensa dekonstruktif, budaya lokal bukan hanya subjek pelestarian, tetapi juga arena pertarungan makna dan wacana yang melibatkan berbagai kepentingan.

Dalam kerangka pemikiran post-strukturalisme, salah satunya melalui perspektif Jacques Derrida, makna tidak pernah final atau stabil. Konsep *différance* yang merupakan gabungan dari *différer* (menangguhkan) dan *différence* (perbedaan) menunjukkan bahwa makna selalu tertunda karena bergantung pada sistem tanda dan relasi antar-tanda lainnya. Dengan demikian, setiap narasi tentang budaya lokal seperti Lawa Bale harus dipahami sebagai teks yang tidak utuh, penuh celah, dan terbuka untuk dibaca ulang. Lawa Bale, secara historis, merupakan ekspresi ritualistik dan simbol hubungan harmonis antara manusia, alam, dan leluhur dalam tradisi

masyarakat Bugis. Sayuti (2019) menyatakan bahwa "Lawa Bale merupakan simbol hubungan harmonis antara manusia, alam, dan leluhur. Ia tidak hanya berfungsi sebagai makanan, tetapi juga sebagai media ritual, pertemuan sosial, dan penguatan identitas budaya masyarakat Danau Tempe." Namun, dalam dinamika pembangunan daerah dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, makna Lawa Bale mengalami transformasi. Budaya lokal tersebut tidak lagi hanya simbol identitas kolektif, tetapi juga objek komodifikasi dalam program pembangunan positivistik dan instrumen legitimasi kekuasaan birokratis.

Pengelolaan sumber daya alam dan budaya lokal seperti lawa bale di Danau Tempe, menghasilkan sejumlah oposisi biner yang kerap muncul sebagai fondasi dari wacana pembangunan dan diplomasi. Oposisi ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga membentuk struktur makna yang mengatur bagaimana ruang, waktu, dan subjektivitas dipahami dan dikontrol dalam proses pembangunan. Menurut pandangan post-strukturalis Derrida, binarisme semacam ini menciptakan hierarki makna yang sering kali menyembunyikan dominasi ideologis atau politik. Oposisi alam vs. budaya merupakan salah satu dualitas yang mendominasi dalam wacana pembangunan dan pengelolaan lingkungan. Di satu sisi, alam sering dilihat sebagai objek teknokratis yang perlu dikelola secara efisien; di sisi lain, budaya dipandang sebagai subjektivitas kolektif yang perlu dilestarikan atau dimanfaatkan untuk tujuan identitas. Dalam perspektif ekologi politik, pemisahan semacam ini bermasalah karena akses terhadap sumber daya, kerusakan ekologis, dan ketimpangan sosial selalu dibentuk oleh relasi kuasa (Kuntjorobekti & Priyono, 2019; Nababan, 2020; Robbins, 2012). Dalam konteks Danau Tempe, alam direpresentasikan sebagai sumber daya air tawar yang harus dikelola secara ekologis sedangkan budaya, dalam hal ini Lawa Bale, menjadi simbol identitas masyarakat Bugis yang perlu dilestarikan melalui pendekatan budaya. Namun, dalam praktiknya, pemerintah daerah cenderung memisahkan dua entitas tersebut secara artifisial, sehingga budaya menjadi instrumen legitimasi pembangunan, bukan subjek utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, kebijakan dengan paradigma hubungan ini akan gagal menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Oposisi pertumbuhan ekonomi vs. kelestarian lingkungan merupakan salah satu wacana biner yang lahir dari paradoks kebijakan pengaturan budaya. Dalam dokumen resmi, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No.14 Tahun 2016, klaim bahwa pembangunan bertujuan melestarikan lingkungan berdiri berseberangan dengan realitas implementasi lapangan. Dalam Pasal 3 huruf g disebutkan bahwa "Pengelolaan Danau Tempe bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat sekitar danau." Namun, dalam Pasal 22 juga disebutkan bahwa: "Pemerintah Daerah mengembangkan potensi pariwisata alam dan budaya di kawasan Danau Tempe sebagai salah satu sumber pendapatan daerah". Dilema ini menunjukkan bahwa pembangunan di era modern ini lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daripada kelestarian lingkungan atau budaya. Ketika Danau Tempe digunakan sebagai objek pembangunan wisata, maka prioritas kebijakan bergeser dari pelestarian ekosistem ke peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), meskipun dengan menggunakan retorika "pelestarian budaya". Sebagaimana dijelaskan oleh Escobar (1995) dalam *Encountering Development*, pembangunan sering kali menggunakan narasi pelestarian sebagai justifikasi atas eksploitasi sumber daya alam dan budaya. Komodifikasi budaya dalam wisata pedesaan dan festival lokal memperlihatkan gejala serupa, yakni budaya dipromosikan sebagai daya tarik ekonomi tetapi sering dilepaskan dari konteks sosialnya (Pratiwo, 2019; Putri & Susilowati, 2022). Ini menciptakan paradoks semakin banyak upaya "pelestarian", semakin besar pula tekanan terhadap sumber daya yang ingin dilestarikan.

Oposisi biner-alam vs. budaya, pertumbuhan vs. kelestarian, dan lokal vs. global bukan hanya konflik epistemologis, tetapi juga memiliki implikasi politik dan ekologis bahwa kebijakan dibuat dalam logika "teknokratis" yang mengabaikan hubungan simbolik mereka dengan danau, degradasi lingkungan terus terjadi, karena kebijakan lebih fokus pada eksploitasi daripada pelestarian serta budaya lokal punah secara lambat laun, karena tidak lagi direproduksi dalam konteks sosial yang relevan, tetapi hanya sebagai objek representasi dalam program-program pembangunan. Dalam kerangka ekologi politik, situasi ini memperlihatkan bagaimana negara,

kapital, dan gerakan masyarakat berhadapan dalam perebutan akses, kontrol, dan definisi atas lingkungan (Kuntjorobekti & Priyono, 2019; Robbins, 2012). Krisis ekologi masyarakat adat di Indonesia juga menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan sering langsung berdampak pada runtuhnya praktik budaya yang bergantung pada ekosistem lokal (Nababan, 2020). Karena itu, narasi pembangunan berkelanjutan perlu dikritisi agar tidak berubah menjadi pencitraan ekologis yang menutupi praktik eksploitasi.

Melalui lensa dekonstruksi, kita dapat melihat bahwa setiap narasi pembangunan selalu penuh celah dan kontradiksi internal. Jika kita terus-menerus membangun kebijakan dalam kerangka biner, maka kita akan terus menghasilkan kebijakan yang eksklusif, tidak partisipatif, dan berpotensi merusak baik lingkungan maupun budaya. Kajian representasi masyarakat pesisir di Indonesia Timur menunjukkan pentingnya menempatkan kearifan lokal sebagai subjek politik, bukan sekadar objek kebijakan atau atraksi pembangunan (Rahayu & Palupi, 2023). Karena itu, kebijakan budaya dan lingkungan perlu membaca ulang posisi masyarakat lokal dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan agar tidak berhenti pada konstruksi identitas regional yang bersifat simbolik (Setiawan, 2022).

Ekologi Politik dan Kontestasi Makna Lawa Bale

Kondisi ekologis Danau Tempe semakin tergerus. Laporan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sulawesi II tahun 2021 menunjukkan bahwa sedimentasi menjadi salah satu faktor utama penurunan daya dukung ekologis Danau Tempe dengan laju sedimentasi sekitar 7–10 cm per tahun. Kondisi tersebut melanjutkan tren pendangkalan yang telah berlangsung sejak beberapa dekade sebelumnya, ketika kedalaman rata-rata danau mengalami penurunan dari sekitar 8 meter pada dekade 1980-an menjadi kurang dari 3 meter berdasarkan berbagai laporan kondisi ekologis Danau Tempe (BBWS, 2021). Penurunan kualitas ekosistem tersebut berdampak terhadap keberlanjutan sumber daya ikan air tawar yang menjadi bahan utama Lawa Bale serta kehidupan sosial masyarakat yang bergantung pada danau. Kajian ekologi politik tentang Danau Tempe juga menegaskan bahwa sedimentasi, perubahan sosial-ekologis, dan kebijakan pengelolaan danau saling berkaitan dalam membentuk kerentanan masyarakat lokal (Syamsuddin & Wahyuni, 2023). Proses pendangkalan ini menyebabkan penurunan drastis populasi ikan air tawar endemik, bahan utama Lawa Bale. Studi ekosistem Danau Tempe dan laporan media lingkungan memperlihatkan bahwa krisis danau tidak hanya berdampak pada ekologi, tetapi juga pada nelayan Bugis dan habitat budaya masyarakat setempat (Mongabay Indonesia, 2021). Sebagai konsekuensi langsung, bahan baku Lawa Bale semakin langka, tradisi membuat dan menyajikan Lawa Bale mulai punah bahkan simbol budaya yang melekat pada hidangan ini ikut tergerus. Dari perspektif Derrida, ini adalah contoh nyata bagaimana makna budaya tidak bisa dipisahkan dari realitas materialnya. Jika fondasi ekologis hilang, maka struktur makna yang dibangun di atasnya juga akan runtuh. Dengan kata lain, tidak ada makna tanpa konteks fisik yang mendukungnya. Di sisi lain, program wisata budaya yang dikembangkan pemerintah daerah menggunakan Lawa Bale sebagai daya tarik wisata tanpa manajerial implementasi kebijakan yang berperspektif ekologi. Fenomena ini mencerminkan logika komodifikasi budaya, yaitu proses di mana elemen budaya dilepaskan dari konteks sosial dan spiritualnya, lalu dijual sebagai produk pasar. Akibatnya, terjadi penggeseran makna dari simbol identitas kolektif menuju instrumen ekonomi pembangunan daerah yang eksploitatif. Artinya, dalam konteks ini narasi pelestarian budaya menyembunyikan hierarki kekuasaan.

Narasi pelestarian budaya dalam pengelolaan Danau Tempe menunjukkan adanya kontradiksi antara representasi simbolik dan praktik tata kelola lingkungan. Pemerintah daerah melalui kebijakan pengelolaan Danau Tempe menempatkan budaya lokal sebagai bagian dari identitas dan potensi wisata daerah. Namun, ketika simbol budaya seperti Lawa Bale lebih banyak digunakan sebagai instrumen promosi tanpa diikuti dengan intervensi ekologis yang memadai, maka terjadi pergeseran fungsi budaya dari praktik kehidupan masyarakat menjadi alat legitimasi kebijakan. Dalam perspektif ekologi politik, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk cultural greenwashing, yaitu penggunaan simbol budaya dan narasi keberlanjutan untuk

membangun citra bahwa suatu kebijakan telah berorientasi pada pelestarian, sementara persoalan struktural seperti degradasi ekosistem dan keterlibatan masyarakat lokal belum sepenuhnya diselesaikan. Dengan kata lain, keberadaan Lawa Bale dalam narasi pembangunan daerah menunjukkan bahwa budaya dapat menjadi instrumen dalam praktik public management, ketika pemerintah mengelola representasi budaya sebagai aset pembangunan tanpa secara bersamaan memastikan keberlanjutan ruang ekologis yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kontradiksi antara retorika pembangunan berkelanjutan dengan realitas implementasinya.

Menurut kritik politik ekologi, seperti yang dikembangkan oleh David Pepper (1996), "*greenwash*" atau pencitraan hijau sering digunakan oleh pemerintah atau perusahaan untuk menyamarkan agenda eksploitatif mereka. Ia menyatakan bahwa "*sustainable development is often used as a rhetorical device to justify projects that are anything but sustainable*" (Pepper, 1996: 203). Dalam konteks Asia Tenggara, penggunaan narasi budaya dalam proyek keberlanjutan juga dapat membentuk *cultural greenwashing*, yaitu pemakaian simbol budaya untuk menciptakan kesan etis, ekologis, dan partisipatif, meskipun relasi kuasa yang eksploitatif tetap berlangsung (Tan & Lim, 2023). Dalam kasus Lawa Bale, program wisata budaya dapat dibaca sebagai bentuk *cultural greenwash*, ketika nilai-nilai budaya digunakan untuk memberi kesan bahwa pemerintah sedang melakukan pelestarian, padahal perlindungan terhadap sumber daya alam yang menjadi akar tradisi belum berjalan memadai. Komodifikasi budaya dalam festival dan wisata lokal memperlihatkan pola serupa, yaitu nilai budaya diproduksi ulang sebagai daya tarik ekonomi yang mudah dikonsumsi oleh pasar (Pratiwo, 2019; Putri & Susilowati, 2022; Wahyuni, 2021).

Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Danau Tempe yang menempatkan peningkatan nilai budaya dan pengembangan potensi wisata sebagai bagian dari tujuan pengelolaan kawasan. Namun, implementasi kebijakan tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara tujuan normatif pelestarian budaya dengan kondisi ekologis Danau Tempe yang terus mengalami tekanan. Dalam konteks ini, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan kebijakan budaya, melainkan pada bagaimana budaya direpresentasikan dalam tata kelola publik dan apakah masyarakat lokal ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses tersebut.

Keretakan budaya adalah manifestasi dari kerusakan ekologis yang lebih luas. Di sinilah titik temu antara ekologi politik dan dekonstruksi makna menurut Jacques Derrida. Dalam pandangan Derrida, makna tidak pernah stabil; ia selalu bergantung pada sistem tanda yang dinamis dan rentan terhadap gangguan (*différance*). Ketika bahan utama Lawa Bale, ikan endemik hilang dari ekosistem Danau Tempe, maka makna hidangan ini pun mulai mengalami proses dekonstruksi. Tradisi yang tidak lagi memiliki dasar material akan menjadi metafora tanpa substansi. Dalam perspektif ekologi politik, kerusakan ekosistem tidak hanya berdampak pada sumber daya alam, tetapi juga pada relasi sosial, praktik budaya, dan posisi politik masyarakat yang menggantungkan hidup pada lingkungan tersebut (Nababan, 2020; Robbins, 2012). Karena itu, krisis sedimentasi dan degradasi Danau Tempe perlu dibaca sebagai krisis budaya sekaligus krisis ekologis (BBWS, 2021).

SIMPULAN DAN SARAN

Kuliner tradisional seperti Lawa Bale tidak hanya merupakan ekspresi budaya atau kekayaan gastronomi lokal, tetapi juga menjadi simbol yang sarat dengan makna filosofis, spiritual, dan politik. Dalam konteks masyarakat Bugis di sekitar Danau Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Lawa Bale memiliki peran penting dalam ritual adat, pertemuan sosial, dan diplomasi antarkomunitas. Hidangan ini mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, dalam perkembangannya, makna Lawa Bale mengalami transformasi signifikan akibat intervensi kebijakan pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Danau Tempe. Dalam regulasi tersebut, Lawa Bale digunakan sebagai simbol identitas budaya

untuk mendukung program wisata daerah. Sayangnya, pendekatan ini cenderung lebih fokus pada aspek ekonomi dan estetika pasar daripada pada upaya pelestarian ekosistem Danau Tempe yang merupakan fondasi material dari tradisi tersebut.

Degradasi lingkungan di Danau Tempe semakin memperparah situasi. Laporan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sulawesi II tahun 2021 menyebutkan tingkat sedimentasi mencapai 7–10 cm per tahun, sehingga kedalaman rata-rata danau turun drastis dari 8 meter pada era 1980-an menjadi kurang dari 3 meter pada tahun 2025. Penurunan kualitas air danau ini menyebabkan populasi ikan air tawar endemik bahan utama Lawa Bale semakin langka, sehingga praktik pembuatan dan penyajian hidangan ini pun mulai punah.

Melalui pendekatan dekonstruksi Jacques Derrida, terlihat bahwa makna budaya tidak bersifat stabil atau final, tetapi selalu tertunda (*différance*) dan bergantung pada sistem tanda serta relasi kuasa. Dalam hal ini, Lawa Bale bukan lagi hanya bagian dari ritus sakral dan ekspresi kearifan lokal, tetapi telah direduksi menjadi komoditas dalam diplomasi budaya yang disertai narasi pelestarian yang sering kali tidak diwujudkan dalam tindakan nyata. Proses ini menunjukkan adanya logika cultural greenwash, yaitu penggunaan nilai-nilai budaya untuk memberi kesan bahwa pemerintah sedang melakukan pelestarian, padahal dalam praktiknya justru terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam dan budaya.

Penelitian ini juga mengungkap sejumlah oposisi biner yang mendasari wacana pembangunan dan diplomasi budaya, seperti alam vs budaya, pertumbuhan ekonomi vs kelestarian lingkungan, serta lokal vs global. Oposisi-oposisi ini menciptakan hierarki makna yang tidak hanya mengabaikan realitas ekologis dan budaya lokal, tetapi juga menyembunyikan dominasi ideologis dan politik oleh negara dan mekanisme pasar. Akibatnya, baik lingkungan maupun budaya lokal mengalami kerusakan secara bertahap karena kebijakan yang lebih berorientasi pada eksploitasi daripada pelestarian.

Secara keseluruhan, Lawa Bale tidak dapat dipandang sebagai entitas budaya statis, tetapi sebagai teks politik yang dinamis dan terlibat dalam konflik representasi, kuasa, dan krisis ekologis. Tanpa pemulihan ekosistem Danau Tempe dan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, maka upaya pelestarian budaya akan tetap menjadi retorika belaka. Dengan demikian, kuliner tradisional harus dilihat tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai medium politik yang membawa jejak masa lalu sekaligus menjadi arena perlawanan dalam menghadapi arus modernisasi dan globalisasi yang semakin menggerus identitas lokal.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan perubahan pendekatan dalam tata kelola budaya dan lingkungan Danau Tempe. Pemerintah Kabupaten Wajo perlu menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama dalam pengelolaan kawasan danau melalui penguatan partisipasi masyarakat, pemulihan ekosistem sebagai dasar keberlanjutan budaya, serta penyusunan program pelestarian Lawa Bale yang tidak berhenti pada aspek promosi wisata. Upaya pelestarian budaya perlu diintegrasikan dengan kebijakan ekologis, seperti rehabilitasi sumber daya ikan, pengendalian sedimentasi, dan penguatan peran komunitas nelayan sebagai penjaga pengetahuan lokal. Dengan demikian, Lawa Bale tidak hanya dipertahankan sebagai simbol identitas daerah, tetapi juga sebagai praktik budaya yang tetap memiliki ruang hidup secara sosial dan ekologis.

Secara akademik, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian mengenai hubungan antara budaya lokal, kebijakan publik, dan perubahan ekologis melalui studi komparatif dengan komunitas lain yang mengalami fenomena serupa. Selain itu, kajian mendatang dapat mengembangkan perspektif ekologi politik budaya dengan melihat lebih jauh bagaimana masyarakat lokal melakukan negosiasi dan resistensi terhadap proses komodifikasi budaya dalam pembangunan daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, A. (2018). *Kearifan Lokal dalam Perspektif Sosial dan Budaya*. Ombak Yogyakarta.
- Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sulawesi II. (2021). *Laporan sedimentasi Danau Tempe*. Indonesia, M. (2021). *Danau Tempe terancam punah, nelayan Bugis terusir dari habitat budayanya*. <https://www.mongabay.co.id/2021/07/08/danau-tempe-terancam-punah-nelayan-bugis-terusir-dari-habitat-budayanya/>
- Kuntjorobekti, D. H., & Priyono, B. (2019). *Ekologi Politik: Negara, Kapital, dan Gerakan Rakyat*. LKiS Yogyakarta.
- Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. *JDPL (Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal)*, 4(2), 128–145.
- Mahendra, I. G. N. (2023). From hearth to heritage: Traditional cuisine in the age of globalization – A case study from Bali, Indonesia. *International Journal of Gastronomy and Food Science*, 31.
- Nababan, A. (2020). *Krisis Ekologi dan Masyarakat Adat di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Pratiwi, S., & Wicaksono, A. (2022). Traditional food as a cultural diplomacy tool: Case study of Indonesian culinary promotion in ASEAN. *Indonesian Journal of Social and Political Communication*, 5(1), 45–60.
- Pratiwo, H. (2019). Komodifikasi Budaya Lokal dalam Festival Wisata: Studi Kasus Festival Pacu Jalur di Riau. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 23(1), 45–56.
- Putri, D. S., & Susilowati, I. (2022). The commodification of local culture in rural tourism: A case study of Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Rural and Community Development*, 17(3), 112–127.
- Rahayu, T., & Palupi, R. (2023). Local wisdom and the politics of representation in coastal communities of Eastern Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JSP)*, 26(3), 210–224.
- Ridwan, M. (2017). *Budaya Politik Orang Bugis*. Pustaka Refleksi.
- Robbins, P. (2012). *Political Ecology: A Critical Introduction (2nd ed.)*. Wiley-Blackwell.
- Saleh, K., & Munif, A. (2015). Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi. *Addin*, 9(2), 309–332.
- Setiawan, B. (2022). Deconstructing cultural policy in post-authoritarian Indonesia: The case of regional identity construction. *Asian Politics & Policy*, 14(3), 401–418.
- Syamsuddin, M. R., & Wahyuni, S. (2023). Sedimentation and socio-ecological change in Lake Tempe, South Sulawesi: A political ecology perspective Title. *Journal of Environmental Management and Sustainability*, 10(2), 89–103.
- Tan, M. L., & Lim, K. (2023). Greenwashing culture: The use of cultural narratives in sustainable development projects in Southeast Asia. *Asia Pacific Viewpoint*, 64(2), 192–206.
- Wahyuni, H. I. (2021). *Komodifikasi Budaya: Globalisasi dan Representasi Lokal*. Jalasutra.
- Windia, I. W. (2020). *Tradisi, Identitas, dan Perubahan Sosial: Studi Antropologi Budaya*. Pustaka Larasan